

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu.

Ghina Zahra Afifa pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu faktor internal dari profitabilitas adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hasil analisis dari regresi menyatakan hasil koefisien variabel pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BUS di Indonesia. Meningkatnya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat akan menambah peluang profitabilitas bagi BUS dengan melihat perkembangan ROA. Semakin banyak pembiayaan maka akan semakin banyak pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan laba.⁷

Diah Ayu Legowati, Ari Prasetyo pada tahun 2016 meneliti tentang pengaruh pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia periode Januari 2009- Desember 2015. Dengan hasil penelitian pembiayaan modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap *nonperforming financing*, apabila terdapat kenaikan selama satu tahun pada pembiayaan modal kerja maka akan berpengaruh pada menurunnya tingkat *non performing*

⁷ Gina Zahra Afifa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, 2014) 37

financing BUS dan UUS di Indonesia. Begitupula dengan pembiayaan investasi.²

Andhika Nanang Permana pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terhadap efisiensi operasional bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan hasil penelitian penyaluran pembiayaan pada sektor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap BOPO BPRS, sektor dengan pembiayaan tertinggi terletak pada sektor lain-lain kemudian di ikuti oleh sektor lainnya.³

Aqidah Asri Suwarsi, pada tahun 2017, meneliti tentang analisis posisi pembiayaan per sektor ekonomi pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian penyaluran pembiayaan berdasarkan preferensi resiko BUS terhadap sektor ekonomi, ekonomi di Indonesia pada deviasi standar 0,0200 dapat diperoleh apabila BUS akan menitik beratkan penyaluran pembiayaan pada sektor ekonomi jasa dunia usaha sebanyak 42,98% dari keseluruhan portofolio pembiayaan BUS dan akan diikuti oleh sektor lainnya.⁴

Dina Fitriana, pada tahun 2016, meneliti tentang pengaruh pembiayaan sektoral terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode januari 2012-Maret 2016. Dengan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan secara

² Legowati, dkk, *Pengaruh pembiayaan Berdasarkan Jenis penggunaan Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015*, (Jurnal Ekonomi Syariah teori dan Terapan, Vol. 3 No.12, 2016) 1017

³ Andhika Nanang Pratama, *Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap Efisiensi Operasional bank pembiayaan Rakyat Syariah*, (Skripsi Ekonomi, Intitut pertanian Bogor, 2017) 35

⁴ Aqidah asri Suwarsi, *Analisis Posisi Pembiayaan Per Sektor Ekonomi pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. VII, No. 2, 2017) 109

bersama-sama antara sektor tersebut terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah, dengan nilai R^2 57,05%.⁵

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meliputi, bahwa pembiayaan sektoral atau pembiayaan sektor ekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) hal tersebut sesuai dengan penelitian Dina Fitriana pada tahun 2016. Keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, terdapat subjek yang berbeda yaitu dengan melihat potensi usaha pada sektor ekonomi yang dianggap bisa dibiayai dan dapat menghasilkan profitabilitas bagi perbankan syariah.

B. Tinjauan Teori.

1. Bank Syariah.

a. Definisi Bank Syariah.

Bank syariah ada di Indonesia sejak tahun 1992. Bank syariah yang pertama kali ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan, artinya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun pertahun. Namun sejak terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, menimbulkan dampak bahwa para bankir berfikir bahwa Bank Muamalat Indonesai merupakan satu-satunya Bank di Indonesia yang tahan

⁵ Dina Fitriana, pengaruh pembiayaan sektoral terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode Januari 2012-Maret 2016, (Tesis: Universitas Islam indonesia, 2016) 126

terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 diikuti dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti adalah bank konvensional yang telah dibeli oleh Bank Dagang Negara dan dikonversikan menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah kedua di Indonesia.⁶

Bank syariah merupakan bank yang mengoperasikan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini berarti bahwa operasi bank syariah menggunakan tata cara berdasarkan Alquran dan sunnah Rasulullah. Bank syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Bank syariah mempunyai layanan yang membebaskan unsur bunga kepada seluruh nasabahnya. Bunga dalam bentuk apapun dilarang dalam perbankan syariah karena bunga merupakan bentuk dari riba, oleh karena itu bank syariah tidak mengenal istilah bunga.⁷ Berdasarkan Alquran dan sunnah larangan riba dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah 275 dan 278.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ ذَرُوا مَا بَلَّغُوا إِلَى الْيَدَيْنِ ۚ أَلَيْسَ بِمُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.⁹

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) 31

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) 32

⁸ Al-Baqarah (2) ayat 275

⁹ Al-Baqarah (2) ayat 278

Perbankan syariah merupakan segala hal yang bersangkutan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, kegiatan usaha, kelembagaan serta proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun fungsi bank syariah yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat berupa titipan maupun investasi. Fungsi yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk jual beli maupun kerja sama dalam bentuk usaha.

Bank syariah mempunyai peran sebagai perantara antara pihak investor dengan seseorang yang sedang membutuhkan dana. Investor yang telah menanamkan uangnya di bank akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lain yang disahkan menurut syariat Islam. Penyaluran dana biasanya menggunakan akad yang dimiliki oleh perbankan syariah, baik akad dalam bentuk jual beli atau kerja sama usaha.

Syarat dan rukun akad perbankan syariah di atur dalam syariat Islam. Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang mengoprasikan usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta menurut

jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹⁰

b. Kelembagaan Perbankan Syariah.

Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya. Terdapat beberapa pembagian kelembagaan pada bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPR Syariah. Serta di luar bank masih terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASNAS) dan Bank Indonesia (BI).

Tabel 2.1 Perkembangan Jaringan kantor Bank Syariah Th. 2016

Kelompok Bank	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor BUS	1.745	1.998	2.151	1.990	1.869
Layanan Syariah Bank	1.794	2.092	2.160	2.175	2.655
Unit Usaha Syariah	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor UUS	517	590	320	311	332
Layanan Syariah Bank	1.277	1.267	1.787	2.009	2.567
BPRS	158	163	163	163	166
Jumlah kantor BPRS	401	402	439	446	453
Jumlah Kantor BUS, UUS, BPRS	2.663	2.990	2.910	2.747	2.654

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (OJK)

1) Bank Umum Syariah (BUS).

Bank umum syariah merupakan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirian, serta bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Sebagai contoh bank umum syariah antara

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) 33

lain; Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mega, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Bukopin.¹¹

BUS dalam operasionalnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS adalah badan usaha yang dapat disetarakan dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), maupun dalam bentuk Koperasi.

2) Unit Usaha Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih berada dalam pengelolaan bank konvensional. UUS merupakan unit kerja yang berasal dari kantor pusat bank konvensional serta mempunyai fungsi sebagai kantor induk dari unit yang telah melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Contoh UUS antara lain BNI Syariah, BII Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah.¹² Dalam struktur organisasi, UUS berada dalam kedudukan satu tingkat di bawah direksi bank konvensional yang bersangkutan. Sebagai unit kerja UUS mempunyai tugas tertentu yaitu:

- a) Mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
- b) Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari keseluruhan kantor cabang.

¹¹ Ismail, *Pernankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) 33

¹² *Ibid* 33

c) Melakukan penatausahaan terkait dengan laporan keuangan kantor cabang syariah.

d) Melaksanakan fungsi treasury dalam hal pengelolaan serta penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

BPRS merupakan bank yang megoprasikan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak melakukan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS dapat disetarakan dengan bank perkreditan rakyat konvensional pada umumnya dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), koperasi maupun Perusahaan daerah (PD).

c. Ciri-Ciri Bank Syariah.

Bank Syariah memiliki ciri-ciri yang cukup berbeda dengan bank konvensional, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pada bank syariah tidak dikenal keuntungan secara pasti. Kepastian keuntungan akan ditentukan setelah keuntungan tersebut diperoleh.
- 2) Uang dari jenis yang sama tidak bisa di perjualbelikan, dengan demikian bank syariah tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai secara langsung, melainkan memberikan pinjaman berupa pembiayaan maupun talangan dana untuk pengadaan barang atau jasa.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013) 515

- 3) Keuntungan dan beban biaya dari produk bank syariah yang telah disepakati tidak pakem dan akan ditentukan dengan kelayakan tanggungan risiko serta pengorbanan masing-masing.
- 4) Dalam perhitungan keuntungan dan biaya administrasi menggunakan presentase semaksimal mungkin akan dihindari, karena presentase dianggap terdapat potensi melipatgandakan.
- 5) Beban biaya akan dikenakan sampai batas waktu kontrak. Apabila masih terdapat sisah utang selepas dari kontrak maka akan dilakukan dengan pembuatan kontrak baru.

d. Peran Bank Syariah Sebagai Lembaga Pembiayaan Bagi Masyarakat.

Bank syariah memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan kegiatannya, tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, fungsi lain dari bank syariah yaitu sebagai penyalur dana kepada masyarakat, baik penyaluran yang akan di gunakan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti dipergunakan untuk pembelian kendaraan, rumah atau properti lainnya.¹⁴

Fungsi penyaluran dana pada bank syariah mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat, karena dengan melakukan pembiayaan di bank syariah masyarakat di khawatirkan bunga yang akan dibayar kepada bank. Karena dalam bank syariah tidak mengenal

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) 221

istilah bunga, oleh karena itu masyarakat yang melakukan pembiayaan di bank syariah akan merasa tentram karena transaksi yang dilakukan jelas terhindar dari unsur ribawi.

Dalam pembiayaan produktif bank syariah tidak menuntut bunga sebagai imbalan jasa, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atas transaksi pembiayaan yang telah dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut sehingga terdapat adanya kesepakatan di awal terkait dengan porsi atau pembagian yang akan didapatkan oleh nasabah dan bank syariah dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha yang telah dilakukan. Pembiayaan diberikan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai modal usaha, kemudian biayanya ditunjukkan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga produk atau hasil usaha yang akan diberikan kemanafaatannya kepada masyarakat luas. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, jasa dan pertanian.

Pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, bank syariah akan mengenakan margin kepada nasabah. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai penjual barang, maka hal yang wajar apabila dalam pembiayaan konsumtif seorang penjual ingin mendapatkan keuntungan atas dagangannya yang telah terjual. Hal seperti ini tidak menjadi larangan dengan kedua belah pihak sama-sama menyepakati.

2. Potensi Usaha.

Dalam memulai usaha tidak akan luput dari modal. Modal tersebut bisa datang dari kantong sendiri dan bisa juga dari pihak lain. Salah satu bentuk modal yang datang dari pihak lain adalah modal dari bank syariah dalam bentuk pembiayaan.

Seorang nasabah butuh modal dari bank untuk menutupi kekurangan modal yang berasal dari kantongnya sendiri. Modal tersebut akan dipergunakan untuk menggerakkan sebuah usaha dibidang pertanian misalnya. Namun untuk mendapatkan modal kerja dari bank bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan bank akan melakukan seleksi terhadap pemberian modal atau yang bisa disebut dengan pembiayaan.

Terjadinya krisis ekonomi memang menyakitkan bagi sebagian besar pihak, hal tersebut dapat terlihat dengan bangkrutnya puluhan bahkan ratusan perusahaan serta abruhnya perbankan dan merebaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan fakta yang konnkrret betapa krisis ekonomi telah memakan banyak korban. Dalam perihal lain, krisis ekonomi juga menstimulasi bagi kalangan belajar survive. Mereka yang telah terkena PHK mencoba alih profesi untuk meneruskan kehidupannya. Mulai dari membuka warung tenda, usaha katering, hingga menjadi makelar mobil bekas. Tidak ada lagi profesi yang tabu, apapun boleh, asalkan halal. Namun dalam keadaan seperti itu mereka yang terkena PHK hal tersebut bukanlah profesi barunya, melainkan hanya sebagai transisi, kalangan tersebut masih mempunyai harapan besar akan berakhirnya krisis ekonomi

dan akan menempatkan kembali posisi profesi yang sebelumnya pernah mereka duduki. Hal seperti itu memang tidak salah, tapi sejarah telah memperlihatkan, kegiatan yang awalnya hanya dianggap “sampingan” terkadang memberikan hasil yang sangat memuaskan. Tidak ada salahnya mengubah paradigma berpikir apapun yang telah dijalani saat ini, profesi apapun, semestinya harus dianggap sebagai yang terbaik. Oleh karena itu, ia harus pula dikelola secara profesional dan sungguh-sungguh.

Sebenarnya untuk mendapatkan pembiayaan bank untuk keperluan tambahan modal bukanlah sesuatu yang rumit. Bank pada dasarnya sudah memiliki suatu pegangan dalam penyaluran pembiayaan. Utamanya adalah yang disebut sebagai 5C. Yakni *character, capital, capacity, condition of economy* dan *colateral*.

Character merupakan integritas dari calon debitur. Jika calon debitur merupakan orang yang baik, tentu tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Bank sering kali menolak dengan alasan karena calon debitur ternyata berkarakter jelek. Misalnya pernah membuat kredit macet di bank lain.

Capital, menyangkut kemampuan calon debitur dalam menyediakan modal sendiri. Jadi dalam menjalankan usaha sebaiknya tidak semua modal berasal dari pembiayaan bank, melainkan sebagian harus ada yang berasal dari modal sendiri. Contohnya, jika akan membangun pabrik, lazimnya bank hanya diperkenankan membiayai 70%, sisanya 30% berasal dari pengusaha itu sendiri.

Selanjutnya bank akan melihat faktor *capacity*, yaitu kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Dalam hal ini, manajemen perusahaan yang sudah relatif besar juga ditelaah. Untuk lingkup perusahaan perorangan, yang lebih banyak ditelaah adalah pengalaman masalah manajemen yang bersangkutan.

Selain itu, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Apakah jenis usaha yang anda jalankan seiring dengan perkembangan ekonomi, jika seiring dengan perkembangan ekonomi maka diasumsikan bahwa usaha yang anda jalankan mempunyai potensi yang tinggi. Kemudian apakah usaha anda termasuk yang didukung pemerintah untuk dikembangkan? Sebagai contoh betapapun prospektifnya usaha perjudian, ia bukanlah kegiatan bisnis yang didukung oleh pemerintah dan termasuk usaha yang dilarang dalam Islam, maka bank tidak akan menerima pengajuan pembiayaan dalam menjalankan usaha seperti di atas.

Selanjutnya adalah aspek *collateral*, merupakan objek usaha itu sendiri. Jadi objek usaha yang dibiayai itulah yang akan menjadi “agunan” pokok. Contohnya anda membutuhkan pembiayaan dalam membangun pabrik roti. Maka pabrik itu akan menjadi collateral. Memang terdapat bank yang meminta agunan berupa rumah atau tanah dari calon nasabah. Namun hal itu sifatnya hanya sebagai agunan tambahan. Bertujuan untuk meleminasi risiko bank, selain itu juga dapat menstimulasi nasabah

untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan pembiayaan.¹⁵

a. Pengertian Potensi usaha.

Banyak orang yang mengerti bisnis, usaha, dan wirausaha, namun tidak semua orang paham akan pengertian peluang usaha. Sebagian orang meremehkan hal ini karena prakteknya lebih penting dari pada teorinya. Padahal teori sangat diperlukan sebelumnya melakukan praktek. Peluang usaha merupakan sebuah kemungkinan yang dipengaruhi gagal atau suksesnya sebuah usaha yang akan terjadi di masa akan datang.

Potensi usaha akan mempengaruhi seseorang dalam memulai usaha baru, terdapat banyak cara untuk menjadikan potensi menjadi peluang usaha. Yang terpenting dalam menciptakan peluang usaha adalah seseorang itu sendiri, oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari individu tersebut bahwa ada dukungan yang kuat untuk mengubah potensi menjadi suatu peluang usaha. Terdapat beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam menciptakan peluang usaha, yaitu: menciptakan gagasan, melakukan seleksi atas gagasan dan menetapkan peluang usaha.¹⁶

Seseorang dalam melakukan usaha terkadang kesulitan dalam hal modal, oleh karena itu sebagian besar seseorang memulai usaha dengan melakukan pembiayaan kepada bank, koperasi, BPRS dan BMT.

Kepentingan pengajuan pembiayaan tersebut didasari oleh terbatasnya

¹⁵ Elvyn G. Masassya, *Cara Cerdas Memutar Uang*, (Jakarta: Gremedia, 2003) 143-147

¹⁶ Dandan Irawan "Potensi Uasaha Koperasi dan Usaha kecil Menegah di daerah Terisolir dan Tertinggal". Jurnal coopetition, Vol. VI, No. 2, November 2015. 57

modal yang dimiliki oleh masyarakat. Pengusaha muslim tentunya berpedoman pada syariat Islam agar terhindar dari riba, gharar, dan bentuk muamalah lainnya yang tidak dihalalkan karena faktor produk dan modal usahanya. Sehingga perbankan syariah hadir menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk memenuhi permintaan pembiayaan pengusaha muslim. Ada beberapa jenis pembiayaan, salah satunya berdasarkan sektor usaha dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sektor Industri. Pembiayaan yang diberikan kepada peminjam yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengelolah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki faedah lebih tinggi. Adapun contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, pertambangan, tekstil dll.
- 2) Sektor Perdagangan. Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan mikro, menengah dan besar. Pembiayaan ini diberikan bertujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjual dll.
- 3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan. Pembiayaan diberikan dalam meningkatkan hasil pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

¹⁷ Ismail “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011) 115

- 4) Sektor Jasa. Terdapat beberapa sektor jasa di bawah ini yang dapat diberikan pembiayaan antara lain: jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya.
- 5) Sektor Perumahan. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk membangun perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

b. Jenis Usaha yang Dapat dipilih.

Peluang untuk pengusaha sangat luas, terdapat ratusan jenis usaha yang dapat dipilih untuk berwirausaha, dari skala kecil sampai dengan skala besar. Untuk memulai sebuah usaha tidak perlu langsung besar sebaiknya usaha dimulai dari yang kecil. Jenis usaha tersebut dapat dikelompokkan menurut rumpunya seperti contoh berikut ini:¹⁸

1) Agribisnis.

Agribisnis biasanya sangat menarik bagi mereka yang mengemari hal-hal yang berkaitan dengan alamiah. Dalam agribisnis tersimpan peluang bisnis yang menjanjikan. Bisnis ini apabila dikelola dengan strategi dan manajemen bisnis yang baik, maka bisnis itu insya Allah akan mendatangkan keuntungan bagi pembisnis.

¹⁸ Ma'ruf Abdullah “ *Wirausaha Berbasis Syariah*” (banjarmasin: Antasari Press, 2011) 76-102

2) Akomodasi.

Usaha dibidang akomodasi ini dapat dibilang tidak terlalu merepotkan, akan tetapi keuntungannya cukup menjanjikan. Bila ingin memiliki fasilitas yang berhubungan dengan bisnis akomodasi atau mempunyai uang yang cukup bisa disarankan untuk memilih bisnis akomodasi ini. Contoh bisnis akomodasi seperti: penyewaan kamar kos, penyewaan lapangan futsal dll. Bisnis akomodasi termasuk bisnis yang produktif meskipun pada awal pembuatan bisnis membutuhkan modal yang banyak.

3) Transportasi.

Transportasi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat besar apalagi dalam perkotaan pasti memerlukan transportasi baik berupa mobil, sepeda motor dan sejenisnya. Adanya transportasi dapat menjadi peluang bisnis bagi pengusaha, usaha yang bisa dibuat berhubungan dengan transportasi seperti, membuka tempat pencucian sepeda motor, antar jemput anak sekolah dll.

4) Jasa Boga.

Usaha kuliner ini tidak akan pernah ada habisnya, apalagi jika terpaut harga terjangkau dan rasa yang enak, tentunya usaha seperti ini akan mendatangkan omset yang banyak bagi pengusaha. Usaha yang bisa dilakukan terkait dengan jasa boga seperti: mendirikan rumah makan, membuka katering dll.

Contoh diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya bisnis yang bisa dijalankan oleh pengusaha. Selain memulai usaha mulai dari yang kecil, pengusaha yang memiliki modal cukup besar bisa juga memulai usaha dengan cara lain seperti: mengakuisisi perusahaan orang lain dan melakukan bisnis waralaba.

3. Pembiayaan.

Dalam sejarah perekonomian muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang sebagai keperluan konsumsi ataupun usaha bisnis, serta melakukan pengiriman uang, sudah sering dan lazim dilakukan.¹⁹ Pembiayaan adalah aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada orang lain, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang di berikan pemilik dana kepada peminjam dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dikembalikan pada saat jatuh tempo.²⁰ Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo dengan imbalan yang bisa disebut dengan bagi hasil.²¹

¹⁹ Krishna Adityangga “*Membumikan Ekonomi Islam Dikursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah*” (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) 19

²⁰ Ismail “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Prenadamedia, 2011) 105

²¹ Muhammad “*Manajemen Pembiayaan Syariah*” (Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2005) 17

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah.²³

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan.

Adapun landasan syariah yang terkait dengan pembiayaan terdapat dalam surah Sad berikut ini:

قَالَ لَقَدْ ظُنَّ الْمَشْرِائِيُّ عَلَى الْعَمَلِ إِجْرَ الْجَنَّةِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِعْلِ لَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ أَهْلُ الْأَعْيُنِ وَالصَّالِحَاتِ وَلَهُنَّ هُنَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَمَّا بَعْضُ
النَّاسِ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِسْمَاءِ الَّتِي يُنَادُواكُم بِهَا فِي الْكُتُبِ وَالْجُنْدِ الْأَعْيُنِ
قَالَ لَقَدْ ظُنَّ الْمَشْرِائِيُّ عَلَى الْعَمَلِ إِجْرَ الْجَنَّةِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِعْلِ لَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

²³ Muhammad Ridwan “*Manajemen Baitul Mal Wattamwil*” (Yogyakarta: UII Press, 2004) 163

Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhanNya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat.²⁴

a. Pembiayaan Produktif.

Pembiayaan produktif akan disalurkan kepada nasabah untuk keperluan investasi, seperti keperluan penambahan modal untuk mengadakan rehabilitasi, pendirian proyek baru atau digunakan sebagai perluasan usaha. Ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu:²⁵

- 1) Sebagai pengadaan barang-barang modal.
- 2) Memiliki perencanaan alokasi dana yang terarah dan matang.
- 3) Memiliki jangka waktu panjang dan menengah.

Pembiayaan produktif pada umumnya akan diberikan kepada nasabah dalam jumlah yang besar dan pengendapannya dapat dikatakan relatif lama. Oleh sebab itu, diperlu adanya penyusunan proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga bisa diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, baru dilakukan penyusunan jadwal angsuran dari pembiayaan yang telah dilakukan.

Dalam penyusunan proyeksi arus kas harus disertai dengan perkiraan keadaan pada masa yang akan datang, hal tersebut guna

²⁴ Q.S Shad (24) 5

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009)

mengingat bahwa pembiayaan produktif yang disalurkan memerlukan waktu yang relatif panjang. Untuk memperkirakan perlu dilakukan perhitungan serta penyusunan proyeksi pada neraca dan rugi laba selama jangka waktu pembiayaan. Melalui perkiraan tersebut dapat terlihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Melihat luasnya aspek yang dikelola serta di pantau maka untuk pembiayaan produktif bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Yaitu bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip penyertaan, secara bertahap bank akan melepaskan penyertaannya dan nasabah akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik berasal dari setoran pemegang saham yang ada atau berasal dari pemegang saham baru.

Skema lain yang diterapkan oleh bank syariah adalah *ijarah muntahia bit-tamlik*, merupakan proses penyewaan barang modal yang diakhiri dengan kepemilikan. Sumber dari perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang diperoleh oleh perusahaan.

Pembiayaan produktif juga merupakan bentuk pembiayaan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari awal yaitu pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses bahan jadi penjualan. Pemakaian pembiayaan produktif dalam proses

produksi pasti mengalami perputaran yang berbeda. Terhadap alat-alat produksi seperti modal tetap contohnya mesin, maka perputaran modal akan berakhir setelah proses produksi selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam sekali proses produksi saja. Untuk memperoleh pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif.²⁶

- 1) Dapat diambil dari *saving*, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan.
- 2) Jika alternatif yang pertama belum bisa, maka pembiayaan dapat dilakukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat (menarik *saving* dari masyarakat).
- 3) Alternatif yang terakhir yaitu melakukan pembiayaan kepada bank maupun masyarakat.

Adiwarman menyatakan yang dimaksud pembiayaan produktif adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat atau keuntungan kedepannya, mencakup hal-hal antara lain:²⁷

- 1) Imbalan yang diharapkan dari pembiayaan produktif adalah berupa keuntungan dalam bentuk uang atau finansial.
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa finansial, sedangkan badan sosial dan badan-badan

²⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sistem Bang Islam Bukan Hanya Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) 715

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2013) 236

pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan yang bersifat finansial.

3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan produktif atau pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memberikan keuntungan dalam bentuk finansial agar dapat hidup dan berkembang serta dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bentuk pembiayaan produktif atau investasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
- b) Investasi pada proyek atau aktiva tetap.
- c) Investasi dalam efek atau surat berharga.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan produktif merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan sebagai:

- 1) Pembuatan proyek baru, yakni pembangunan proyek dalam rangka melakukan usaha baru.
- 2) Rehabilitasi, penggantian mesin atau alat produksi dengan yang baru.
- 3) Modernisasi, penggantian mesin atau alat dengan yang baru dan lebih canggih dalam hal teknologi.
- 4) Ekspansi, yaitu penambahan mesin yang telah ada dengan mesin baru serta dengan teknologi yang sama atau yang lebih tinggi.

5) Relokasi proyek yang sudah ada, pemindahan pabrik atau proyek dari satu tempat ke tempat lain, termasuk sarana penunjang pabrik.

Maksud dari pembahasan tentang proyek yang paling utama adalah menetapkan potensi penghasilan proyek, yaitu dengan menilai apakah akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali semua biaya modal dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk selanjutnya diharapkan proyek akan tetap berjalan dan berkembang.

Selain itu, sesuai dengan peranan bank dalam menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, pembahasan proyek juga di maksudkan untuk menilai manfaat sosila ekonomis dari proyek yang mendapat pembiayaan produktif tersebut. Pembiayaan produktif dipergunakan untuk proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerapan tenaga kerja baru, meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk informil, serta memberikan sosial benefit kepada masyarakat luas.

b. Ketentuan Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Produktif.

Bank akan meberikan pembiayaan produktif , dengan ketentuan sebagai berikut:²⁸

- 1) Bank akan melakukan penilaian proyek atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 tahun.

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) 238

- 3) Melihat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 4) Memenuhi ketentuan *bankable* yang berlaku (seperti persyaratan penerima pembiayaan dan jaminan).

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua bagian yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan makro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:²⁹

- 1) Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Oleh karena itu diharapkan pembiayaan yang dilakukan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
- 2) Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan dana tambahan dalam pengembangannya.
- 3) Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat, agar mampu meningkatkan daya produksinya. Karena upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja baru. Hal ini berarti menambah lapangan kerja baru.

²⁹ *Ibid* 17

- 5) Terjadi distribusi pendapatan, masyarakat yang melakukan usaha produktif diharapkan mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan kepada masyarakat.

Bagian yang kedua yaitu pembiayaan secara mikro, pembiayaan ini diberikan dengan tujuan:

- 1) Upaya memaksimalkan laba yang diperoleh, setiap usaha yang dioperasikan memiliki tujuan yang tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha pasti ingin mencapai laba yang maksimal. Untuk dapat mencapai laba yang maksimal maka pengusaha perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, setiap usaha yang dilakukan supaya mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang ada dan tanpa adanya sumber daya modal. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

4) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat terdapat kesenjangan ekonomi dalam artian terdapat masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi akses dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (minus).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bank syariah adalah semua pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk mendukung investasi dalam menjalankan sebuah usaha dan mendapatkan keuntungan yang semestinya. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan dapat dilakukan bagi hasil antara bank dengan nasabah.

e. Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi.

Bank Indonesia telah mengelompokkan pembiayaan menjadi tiga kategori, yaitu:³⁰

- 1) Berdasarkan akad pembiayaan.
- 2) Berdasarkan jenis penggunaan.
- 3) Berdasarkan sektor ekonomi.

Di Indonesia pembiayaan di salurkan kepada sepuluh sektor ekonomi sebagaimana yang didasarkan atas *Internasional Standard Industrial Clasificatiion* (ISIC), klasifikasi standar internasional adalah

³⁰ Andhika Nanang permana, *Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi Terhadap efisisensi Operasional Bank pembiayaan rakyat syariah* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Intitut Pertanian Bogor, 2017) 7

sistem klasifikasi data ekonomi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sepuluh sektor tersebut yaitu:³¹

- 1) Pertanian, Kehutanan perburuan, dan sarana pertanian. Pertanian dalam hal ini meliputi tanaman perkebunan, pangan, peternakan dan perikanan.
- 2) Pertambangan ynag meliputi minyak gas dan bumi, batu bara, biji logam dan lain-lain.
- 3) Listrik, Air, dan Gas.
- 4) Industri pengolahan meliputi industri makanan, minuman, tembakau, indsutri tekstil, sandang, makanan ternak, industri bahan kertas, industri kayu dan hasil-hasil kayu, batu bara dan lain-lain.
- 5) Konstruksi, merupakan jasa pembangunan dan perbaikan perumahan, jalan raya dan jembatan dan lain-lain.
- 6) Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi yang meliputi biro perjalanan, pengangkutan umum, komunikasi dan pergudangan.
- 7) Perdagangan, restoran dan hotel meliputi pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri, restoran dan hotel, distribusi perdagangan ecer.
- 8) Jasa-jasa dunia usaha meliputi *real estate* dan jasa-jasa profesi.
- 9) Jasa-jasa masyarakat yang meliputi kebudayaan dan hiburan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

³¹ Laporan Bank Umum, Bank Indonesia, 2000.

- 10) Lain-lain meliputi, kendaraan bermotor, perumahan dan alat-alat rumah tangga.

4. Profitabilitas.

Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai faktor pendorong dalam memantau aspek likuiditas serta solvabilitas. Dalam jangka panjang, perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup dari usahanya sehingga mampu membayar kewajibannya. Apabila terjadi kerugian dalam jangka panjang akan berakibat memburuknya aspek solvabilitas perusahaan, dan apabila perusahaan akan memperluas usahanya, maka perusahaan memerlukan *retained earning* untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jangka pendek, kerugian akan segera menurunkan likuiditas perusahaan. Lebih lanjutnya, profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar.³²

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Mengukur tingkat profitabilitas hal yang sangat penting diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah keuntungan yang di targetkan oleh perusahaan dalam periode tertentu sudah tercapai.

Rasio profitabilitas dapat dicari dengan rumus berikut ini:³³

Return On Aset merupakan rasio yang mengambar kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan

³² Rodoni & Ali, “*Manajemen Keuangan Modern*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) 192

³³ Prasanjaya, AA Yogi, dan I Wayan Ramantha, *Analisis pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuiran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar di BEI*, E-Jurnal Akuntansi (2013) 245

aktiva yang menghasilkan laba. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh serta semakin baik pula posisi bank apabila dilihat dari penggunaan aset, sehingga bank mengalami kondisi bermasalah yang semakin kecil.³⁴ *Return On Aset* dalam dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

5. Keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat

Bank syariah mempunyai fungsi sebagai penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya dalam penyaluran yang bersifat produktif, penyaluran dana pada perbankan syariah berupa pembiayaan. Tujuan dari pembiayaan adalah untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial. Penyaluran pembiayaan produktif yang digunakan dalam pengembangan usaha ataupun pembuatan proyek baru sangat berpengaruh pada keuntungan bank syariah sendiri. Bank akan memberikan pembiayaan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya bank akan melihat seperti apa potensi usahanya, karena potensi usaha yang tinggi dan perkembangan yang begitu cepat akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ghina Zahra Afifa pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu faktor internal dari profitabilitas

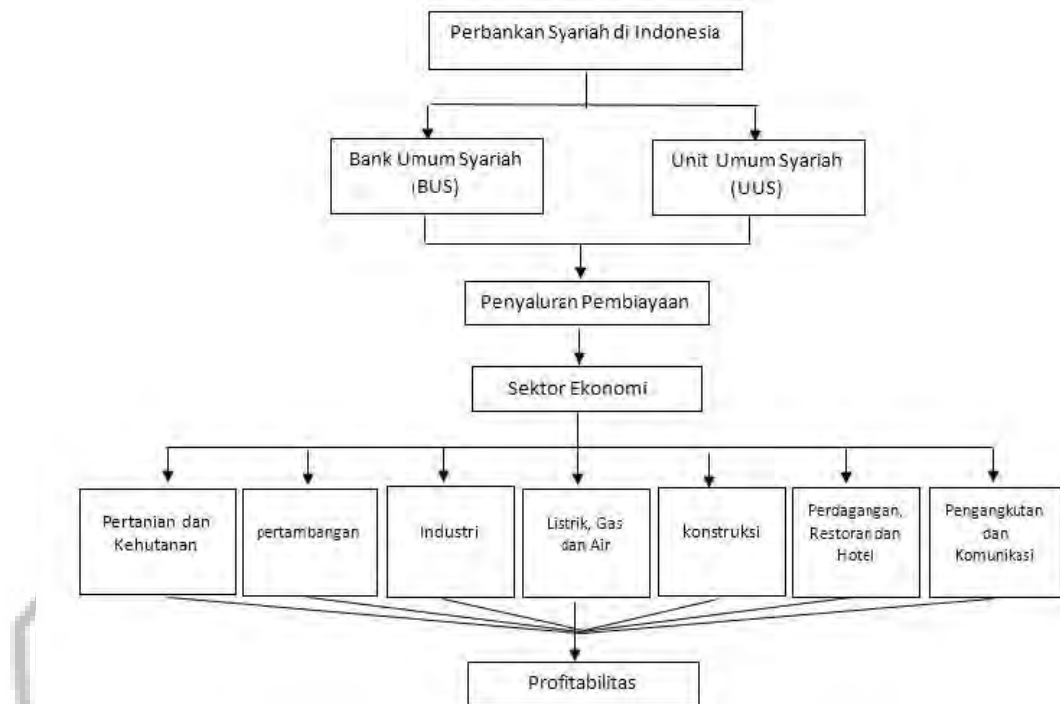
³⁴ Amir Machmud, Rukmana, *Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) 166

adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hasil analisis dari regresi menyatakan hasil koefisien variabel pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BUS di Indonesia. Dan Andhika Nanang Permana pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terhadap efisiensi operasional bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan hasil penelitian penyaluran pembiayaan pada sektor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap BOPO BPRS

6. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Sekaran, 2014: 114). Kerangka membahas saling keterkaitan hubungan antara variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi paradigma situasi dan kondisi yang saling diteliti. Kerangka pemikiran didalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.



7. Hipotesis.

Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang keadaan tertentu yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Hipotesis adalah jawaban sementara kemudian akan diuji kebenarannya dengan penelitian yang akan dilakukan.³⁵ Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini, adalah:

Hipotesis : H_1 : Potensi usaha berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_2 : Potensi usaha tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

³⁵ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Metode dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003) 59